

## **Efektivitas Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia Dalam Mengurangi Hambatan Perdagangan Serta Implikasinya terhadap Strategi Ekonomi Nasional**

**PM Erza Killian\*, Primadiana Yunita, Reza Triarda**

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

\*primadiana@ub.ac.id

### **Abstract**

*Indonesia has signed multiple Free Trade Agreements (FTAs) to expand market access. However, the utilization rate of preferential tariffs remains low, while non-tariff barriers and rules of origin (ROO) complexity persist. This study aims to assess the effectiveness of Indonesia's FTAs in reducing trade barriers, explain the implementation factors that make their impacts partial, and draw implications for Indonesia's national economic strategy. Using a qualitative policy case study approach, the research combines semi-structured online interviews with eight officials from the Ministry of Trade and document analysis of FTA texts, implementing regulations, technical reports, and trade data; validity is strengthened through source triangulation. The findings show that FTAs have lowered tariffs and expanded market coverage to roughly 70% of Indonesia's exports, yet the benefits have not been translated evenly across firms. Preferential use particularly among MSMEs is constrained by ROO compliance costs, documentation and input traceability burdens, post-shipment verification concerns, and divergent technical standards and certification requirements. Moreover, rising sustainability and labor compliance demands increase compliance costs, leaving de facto barriers significant even when preferential tariffs are available. FTA proliferation also generates a noodle bowl effect through overlapping rules and procedures, prompting firms to choose MFN tariffs when preferential savings do not justify administrative costs. The study concludes that FTA effectiveness depends critically on regulatory harmonization, simplification of preferential procedures, strengthened MSME compliance capacity, and enhanced digital trade facilitation to ensure more inclusive and sustainable gains.*

**Keywords:** *Free Trade Agreements; Trade Barriers; Utilization Rate; Rules of Origin; Trade Policy*

### **Abstrak**

Indonesia menandatangani berbagai *Free Trade Agreements* (FTAs) untuk memperluas akses pasar. Namun, tingkat pemanfaatan tarif preferensial (*utilization rate*) masih rendah, sementara hambatan nontarif dan kompleksitas *rules of origin* (ROO) tetap tinggi. Studi ini bertujuan menilai efektivitas FTAs Indonesia dalam mengurangi hambatan perdagangan serta menjelaskan faktor implementasi yang membuat dampaknya parsial, kemudian menarik implikasi bagi strategi ekonomi nasional. Metode yang digunakan adalah studi kasus kebijakan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dengan delapan pejabat Kementerian Perdagangan (*daring*) dan telaah dokumen perjanjian, regulasi pelaksana, laporan teknis, serta data perdagangan; validitas dijaga melalui triangulasi antar-sumber. Hasil menunjukkan bahwa FTAs menurunkan tarif dan memperluas cakupan pasar hingga sekitar 70% ekspor, tetapi manfaatnya belum terkonversi merata. Pemanfaatan preferensi terutama oleh UMKM terhambat oleh biaya kepatuhan ROO, beban dokumentasi dan ketertelusuran *input*, kekhawatiran verifikasi

pasca keberangkatan, serta variasi standar teknis dan sertifikasi. Selain itu, tuntutan keberlanjutan dan ketenagakerjaan meningkatkan biaya kepatuhan sehingga hambatan *de facto* tetap kuat meski tarif preferensial tersedia. Proliferasi FTA memunculkan *noodle bowl effect* berupa tumpang tindih ketentuan dan prosedur yang mendorong pelaku usaha memilih tarif MFN ketika penghematan preferensi tidak sebanding dengan biaya administrasi. Kesimpulannya, efektivitas FTAs sangat ditentukan oleh *regulatory harmonization*, penyederhanaan prosedur preferensi, peningkatan kapasitas kepatuhan UMKM, dan penguatan fasilitasi perdagangan berbasis digital agar manfaat FTA lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **Kata Kunci: Perjanjian Perdagangan Bebas; Hambatan Perdagangan; *Utilization Rate*; *Rules of Origin*; Kebijakan Perdagangan**

#### **Pendahuluan**

Indonesia termasuk negara yang aktif memanfaatkan perjanjian perdagangan untuk memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing di tengah fragmentasi rezim perdagangan global. Arah kebijakan perdagangan Indonesia menunjukkan dinamika yang tidak selalu linear: di satu sisi terdapat dorongan integrasi melalui perjanjian regional/plurilateral, namun di sisi lain muncul kebutuhan proteksi selektif dan penyesuaian domestik yang kompleks (Patunru, 2023). Dalam konteks tersebut, *Free Trade Agreements* (FTAs) menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan regional sekaligus merespons perubahan lanskap ekonomi-politik global.

Secara konseptual, FTAs diharapkan mengurangi hambatan perdagangan melalui penurunan tarif dan perbaikan aturan perdagangan. Namun, literatur kebijakan perdagangan menegaskan bahwa ketika tarif menurun, *non-tariff measures* (NTMs) seperti standar teknis, SPS/TBT, serta persyaratan sertifikasi sering menjadi sumber utama biaya kepatuhan dan ketidakpastian bagi eksportir (Cadot & Malouche, 2012; Kee et al., 2009). Dengan demikian, liberalisasi tarif tidak otomatis menghasilkan penurunan hambatan perdagangan apabila hambatan nontarif dan beban administrasi tetap tinggi.

Dalam konteks Indonesia, problem efektivitas FTAs paling sering tercermin pada rendahnya *utilization rate* (tingkat pemanfaatan) tarif preferensial. Bukti berbasis survei dan analisis kebijakan menunjukkan pemanfaatan FTA belum optimal karena kompleksitas prosedur, kebutuhan dokumen pembuktian asal barang, serta variasi ketentuan *rules of origin* (ROO) antar perjanjian (Andiani, 2024). Di tingkat pelaku usaha, keputusan menggunakan preferensi tarif juga dipengaruhi oleh biaya kepatuhan, kapasitas administrasi, serta pengetahuan terhadap skema FTA (Nasution & Verico, 2019).

Kondisi ini mengindikasikan adanya gap antara desain perjanjian dan kemampuan aktor ekonomi untuk mengonversi preferensi tarif menjadi keuntungan biaya yang nyata. Keterbatasan tersebut cenderung lebih berat bagi UMKM karena hambatan ekspor yang dominan kerap bukan tarif semata, melainkan kendala standar, sertifikasi, informasi pasar, serta keterbatasan manajerial dan jejaring (Revindo, 2017; Tambunan, 2024). Pada saat yang sama, proliferasi perjanjian dapat memunculkan *noodle bowl effect*, yakni tumpang tindih aturan terutama ROO dan prosedur lintas skema FTA yang meningkatkan beban administratif serta mempersulit perusahaan memilih skema preferensi yang paling efisien (Baldwin, 2008; Elms, 2013; Kawai & Wignaraja, 2011).

Dalam situasi demikian, sebagian pelaku usaha memilih menggunakan tarif MFN karena biaya kepatuhan preferensi dianggap tidak sebanding dengan penghematan tarif. Upaya perbaikan kebijakan kemudian bergerak pada dua arah: penyesuaian implementasi

di tingkat perjanjian dan reformasi domestik untuk menekan biaya kepatuhan. Contohnya, dinamika amandemen perjanjian tertentu menunjukkan bahwa hambatan teknis dan implementasi dapat tetap signifikan meskipun kerangka perjanjian telah ada (Christina, 2024). Di level kawasan, konsolidasi melalui perjanjian yang lebih “terintegrasi” dipandang berpotensi menekan kompleksitas aturan dan mengurangi efek tumpang tindih, mengingat skala dan desain kelembagaannya (Petri & Plummer, 2020). Di luar desain perjanjian, fasilitasi perdagangan logistik, kepabeanan, dan digitalisasi prosedur juga menentukan apakah preferensi tarif benar-benar menurunkan *trade costs*, karena kinerja logistik dan reliabilitas rantai pasok berkorelasi dengan biaya dan ketepatan waktu perdagangan (Portugal-Perez & Wilson, 2012; Martí et al., 2014; Gani, 2017).

Celah penelitian terletak pada minimnya kajian yang menghubungkan secara terpadu antara desain *free trade agreements* (FTAs) khususnya ketentuan asal barang (*rules of origin/ROO*) dan hambatan nontarif (*non-tariff measures/NTMs*) dengan praktik implementasi domestik, terutama koordinasi lintas lembaga, biaya kepatuhan, serta kapasitas pelaku usaha (khususnya UMKM), dalam menjelaskan rendahnya pemanfaatan preferensi dan dampak liberalisasi tarif yang parsial. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menelusuri mekanisme lintas level yang mengaitkan desain perjanjian, beban kepatuhan, kapasitas pelaku usaha, dan agenda reformasi domestik dalam konteks FTAs Indonesia (Andiani, 2024; Kawai & Wignaraja, 2011).

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas FTAs Indonesia dalam mengurangi hambatan perdagangan dengan menyoroti tantangan implementasi (ROO, NTMs, dan prosedur), serta menarik implikasinya bagi strategi ekonomi nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen dan wawancara dengan pejabat terkait untuk memetakan friksi implementasi dan faktor yang memengaruhi pemanfaatan preferensi. Kontribusi utama artikel ini adalah: (1) menawarkan penjelasan mekanisme implementasi yang membuat dampak liberalisasi tarif bersifat parsial, dan (2) merumuskan agenda perbaikan berbasis harmonisasi regulasi (*regulatory harmonization*), penyederhanaan prosedur preferensi, serta penguatan dukungan teknis digital agar pemanfaatan FTAs lebih inklusif dan berdampak pada transformasi ekonomi jangka panjang.

## Metode

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus kebijakan untuk menganalisis efektivitas *free trade agreements* (FTAs) Indonesia dalam mengurangi hambatan perdagangan serta implikasinya bagi strategi ekonomi nasional. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur via *Zoom Meeting* dengan 8 informan kunci dari Kementerian Perdagangan yang dipilih secara *purposive*, yakni pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan terkait perundingan, implementasi/fasilitasi pemanfaatan, atau evaluasi FTAs serta terlibat dalam isu seperti hambatan tarif nontarif, *rules of origin* (ROO), dan koordinasi kebijakan. Seluruh wawancara dilakukan secara *daring* melalui *Zoom* pada 9 September 2025. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen mencakup teks perjanjian, regulasi pelaksana, laporan resmi, publikasi akademik, serta data/statistik perdagangan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, pengodean, dan pengelompokan tematik (hambatan tarif, *non-tariff measures/NTMs*, *utilization rate*, ROO/noodle bowl effect, dan respons kebijakan), kemudian ditafsirkan secara deskriptif. Kredibilitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode (wawancara dan dokumen), *member checking* terbatas pada ringkasan temuan kunci, serta *audit trail* untuk memastikan keterlacakkan proses analisis.

## Hasil dan Pembahasan

Dinamika implementasi perjanjian perdagangan bebas di Indonesia memperlihatkan sejumlah pola penting yang mencerminkan hubungan antara desain kebijakan, kesiapan pelaku usaha, dan perkembangan standar perdagangan global. Berbagai temuan lapangan mengungkap bahwa upaya Indonesia mengurangi hambatan perdagangan melalui FTAs bergerak dalam konteks yang kompleks, mulai dari pemanfaatan preferensi tarif hingga kemampuan menyesuaikan diri dengan regulasi teknis dan norma internasional. Untuk memahami dinamika tersebut secara utuh, pembahasan berikut menelusuri aspek-aspek kunci yang muncul dari hasil penelitian.

### 1. Efektivitas FTAs Indonesia dalam Mengurangi Hambatan Perdagangan

Hasil wawancara *daring* melalui *Zoom* pada 9 September 2025 dengan lima pejabat Kementerian Perdagangan Aji (Direktorat Perundingan Bilateral), Fachrur Rozi (Direktorat Perundingan Bilateral), Ilham (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional), Irawan (Direktorat Organisasi Perdagangan Dunia/WTO), dan Dwi Hidayat (Direktorat Pengamanan Perdagangan) menunjukkan bahwa *free trade agreements* (FTAs) diposisikan sebagai instrumen utama strategi perdagangan Indonesia untuk menurunkan hambatan tarif, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing ekspor. Aji dari Direktorat Perundingan Bilateral menyatakan bahwa preferensi tarif dipandang sebagai keunggulan kebijakan untuk meningkatkan posisi tawar produk Indonesia di pasar mitra, terutama pada sektor yang berhadapan dengan pesaing dari negara yang tidak memiliki perjanjian serupa (Wawancara, 9 September 2025). Sejalan dengan itu, Ilham dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menegaskan bahwa logika preferensi tarif menjadi landasan desain kebijakan FTA Indonesia, yakni memperbesar peluang ekspor melalui penurunan friksi perdagangan dan biaya transaksi lintas batas (Wawancara, 9 September 2025).

Fachrur Rozi dari Direktorat Perundingan Bilateral menambahkan bahwa penurunan biaya transaksi diperlakukan sebagai prasyarat agar akses pasar dalam FTA dapat terealisasi pada tingkat pelaku usaha (Wawancara, 9 September 2025). Temuan ini dapat dijelaskan melalui kerangka *gravity model* yang menempatkan penurunan hambatan perdagangan baik tarif maupun biaya transaksi sebagai faktor yang mendorong peningkatan arus perdagangan bilateral (Tinbergen, 1962; Anderson & Wincoop, 2003).

Dari sisi cakupan, Ilham dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menyatakan bahwa jaringan FTA Indonesia yang semakin luas dipahami sebagai modal struktural untuk memperbesar ruang preferensi bagi ekspor (Wawancara, 9 September 2025). Ia menambahkan bahwa perluasan cakupan perjanjian secara kebijakan ditargetkan berkontribusi pada peningkatan *trade creation* karena preferensi tarif diharapkan memperluas akses dan meningkatkan perdagangan antarmitra (Wawancara, 9 September 2025). Secara teoretis, penurunan hambatan melalui liberalisasi memang dapat memicu *trade creation* ketika perdagangan antarmitra meningkat akibat preferensi (Baier & Bergstrand, 2007).

Namun, Fachrur Rozi dari Direktorat Perundingan Bilateral menggarisbawahi bahwa cakupan perjanjian tidak identik dengan manfaat yang benar-benar dinikmati pelaku usaha, karena realisasi manfaat bergantung pada pemanfaatan preferensi dan kemampuan memenuhi ketentuan teknis perjanjian (Wawancara, 9 September 2025). Penekanan yang sama juga disampaikan Aji dari Direktorat Perundingan Bilateral yang menilai bahwa manfaat FTA baru tampak ketika pelaku usaha mampu mengonversi peluang akses pasar menjadi transaksi aktual melalui kepatuhan prosedural dan teknis (Wawancara, 9 September 2025). Temuan yang paling konsisten dari wawancara adalah bahwa *utilization rate* tarif preferensial masih menjadi tantangan utama efektivitas FTA.

Dwi Hidayat dari Direktorat Pengamanan Perdagangan menyatakan bahwa rendahnya pemanfaatan preferensi merupakan persoalan implementasi yang berulang dalam evaluasi internal, terutama pada eksportir skala kecil menengah (Wawancara, 9 September 2025).

Menurut Dwi Hidayat, rendahnya pemanfaatan preferensi dipicu oleh kompleksitas ketentuan asal barang (*rules of origin/ROO*) dan dokumen pembuktian asal barang yang menuntut penelusuran *input* serta konsistensi dokumen pemasok (Wawancara, 9 September 2025). Ia menambahkan bahwa kekhawatiran pelaku usaha terhadap verifikasi atau audit kepabeanan meningkatkan persepsi risiko ketika menggunakan preferensi tarif (Wawancara, 9 September 2025).

Selain itu, Dwi Hidayat menjelaskan bahwa pada sebagian komoditas, prosedur administrasi klaim preferensi dipandang tidak sebanding dengan besaran margin penghematan tarif, sehingga pelaku usaha cenderung memilih jalur yang lebih sederhana meskipun preferensi tersedia (Wawancara, 9 September 2025). Temuan lapangan ini memperkuat argumen bahwa indikator efektivitas FTA tidak cukup diukur dari *coverage rate*, melainkan perlu mempertimbangkan *utilization rate* dan nilai preferensi yang benar-benar digunakan Cheong (2010) serta sejalan dengan temuan empiris mengenai rendahnya pemanfaatan preferensi pada sebagian eksportir (Hayakawa et al., 2021).

Selain itu, wawancara menunjukkan bahwa hambatan nontarif tetap menjadi penghalang utama, bahkan ketika tarif telah diturunkan. Irawan dari Direktorat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyatakan bahwa variasi standar teknis dan sertifikasi merupakan hambatan yang paling sering mengunci akses pasar, terutama pada produk yang sensitif standar seperti pangan olahan dan sejumlah produk manufaktur (Wawancara, 9 September 2025). Irawan juga menyoroti meningkatnya tuntutan keberlanjutan dan kepatuhan ketenagakerjaan di negara mitra yang menambah biaya kepatuhan sekaligus memperpanjang proses ekspor (Wawancara, 9 September 2025).

Sejalan dengan itu, Ilham dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menilai bahwa dinamika standar baru tersebut dapat mengurangi signifikansi preferensi tarif apabila kapasitas pemenuhan standar belum memadai (Wawancara, 9 September 2025). Kondisi ini konsisten dengan literatur yang menempatkan *non-tariff measures* (NTMs) sebagai sumber utama biaya transaksi dan ketidakpastian perdagangan ketika hambatan tarif menurun Kee et al., (2009); Cadot & Malouche (2012) serta dengan temuan bahwa manfaat FTA sangat dipengaruhi oleh kesiapan domestik dalam memenuhi persyaratan pasar (Urata & Okabe, 2020).

Wawancara juga menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas dalam memanfaatkan FTA. Aji dari Direktorat Perundingan Bilateral menyatakan bahwa eksportir besar umumnya memiliki perangkat kepatuhan, sistem dokumentasi, akses konsultasi, dan pengalaman prosedural sehingga lebih siap menggunakan preferensi tarif (Wawancara, 9 September 2025). Sementara itu, Fachrur Rozi dari Direktorat Perundingan Bilateral menambahkan bahwa UMKM lebih rentan terhadap keterbatasan informasi, biaya administrasi, dan kesulitan memenuhi persyaratan teknis, sehingga manfaat preferensi lebih cepat dinikmati oleh pelaku usaha berskala besar (Wawancara, 9 September 2025). Konsekuensinya, keberhasilan FTA lebih jelas terlihat pada penurunan hambatan tarif secara legal-formal, tetapi manfaatnya belum terkonversi merata karena hambatan administratif dan teknis tetap menjadi pengunci di tingkat implementasi. Dengan kata lain, efektivitas FTA tidak berhenti pada tarif yang menurun, melainkan ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha menanggung biaya kepatuhan dan menavigasi persyaratan pasar. Pada bagian berikutnya, pembahasan diarahkan pada sumber friksi implementasi yang paling menonjol, yakni tumpang tindih ketentuan antar skema (*noodle bowl effect*) dan hambatan nontarif, yang menjelaskan mengapa hambatan *de facto* tetap kuat meski kerangka preferensi telah tersedia.

## 2. Kompleksitas Implementasi: *Noodle Bowl Effect* dan Hambatan Nontarif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia dalam mengoptimalkan manfaat *free trade agreements* (FTAs) tidak hanya berada pada tahap perundingan, tetapi terutama pada tahap implementasi. Aji dari Direktorat Perundingan Bilateral dan Fachrur Rozi dari Direktorat Perundingan Bilateral menyatakan bahwa semakin banyak FTA yang aktif, semakin tinggi friksi kepatuhan di tingkat pelaku usaha mulai dari perbedaan ketentuan asal barang (*rules of origin/ROO*), variasi dokumen pendukung, hingga perbedaan prosedur klaim preferensi antarskema perjanjian (Wawancara, 9 September 2025).

Kondisi ini sejalan dengan literatur mengenai *noodle bowl effect* yang menegaskan bahwa proliferasi FTA dapat menciptakan tumpang tindih aturan, prosedur, dan standar yang justru menambah hambatan baru (Baldwin, 2008). Fachrur Rozi menekankan bahwa kebingungan memilih skema preferensi kerap berujung pada keputusan pragmatis, yakni pelaku usaha memilih jalur yang paling pasti secara administratif meskipun mengorbankan potensi penghematan tarif (Wawancara, 9 September 2025).

Penekanan serupa juga disampaikan Aji yang menilai bahwa kepastian prosedural sering lebih menentukan keputusan pelaku usaha dibanding besaran preferensi tarif itu sendiri (Wawancara, 9 September 2025). Kompleksitas tersebut paling berat dirasakan UMKM karena keterbatasan kapasitas administratif. Dwi Hidayat dari Direktorat Pengamanan Perdagangan menyatakan bahwa UMKM bukan hanya perlu memahami perbedaan ROO antarperjanjian, tetapi juga harus menanggung biaya tambahan untuk menata dokumentasi rantai pasok, memastikan konsistensi dokumen pemasok, serta menyiapkan diri menghadapi verifikasi atau audit (Wawancara, 9 September 2025).

Aji menambahkan bahwa beban dokumentasi dan ketertelusuran *input* menjadi hambatan berulang, terutama ketika UMKM bergantung pada pemasok skala kecil yang tidak selalu memiliki dokumen pendukung yang rapi dan seragam (Wawancara, 9 September 2025). Dalam beberapa kasus yang dibahas, Fachrur Rozi menyatakan bahwa pelaku UMKM menilai penghematan tarif preferensial tidak cukup besar untuk menutup biaya pengurusan dokumen asal barang dan risiko verifikasi pascakeberangkatan; ketika selisih tarif relatif kecil, membayar tarif MFN dipandang lebih sederhana dan lebih terkendali risikonya sehingga preferensi tidak digunakan meskipun tersedia (Wawancara, 9 September 2025).

Pola ini konsisten dengan argumen bahwa FTA yang kompleks cenderung menurunkan pemanfaatan preferensi, terutama di negara berkembang dengan kapasitas kelembagaan dan pelaku usaha yang belum kuat (Kawai & Wignaraja, 2011). Selain kompleksitas ROO, penelitian ini menemukan bahwa hambatan perdagangan modern semakin bergeser dari tarif ke hambatan nontarif berbasis standar dan kepatuhan. Irawan dari Direktorat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyebut peningkatan standar teknis, sertifikasi, dan tuntutan keberlanjutan sebagai hambatan nontarif “generasi baru” karena persyaratan akses pasar tidak hanya terkait spesifikasi produk, tetapi juga proses produksi dan ketertelusuran rantai pasok (Wawancara, 9 September 2025).

Irawan menekankan bahwa tuntutan kepatuhan tersebut dapat menambah biaya dan waktu penuhan, terutama pada produk yang sensitif standar (Wawancara, 9 September 2025). Ilham dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menjelaskan bahwa proses penuhan sertifikasi, penyesuaian label, atau verifikasi teknis dapat memperpanjang *lead time* dan menambah biaya tetap ekspor; bagi UMKM, tambahan biaya dan waktu tersebut membuat preferensi tarif kurang terasa karena hambatan utama bergeser dari bea masuk ke persyaratan masuk pasar (Wawancara, 9 September 2025). Kondisi ini sejalan dengan literatur yang menempatkan *non-tariff*

measures (NTMs) sebagai sumber utama biaya transaksi dan ketidakpastian perdagangan ketika hambatan tarif menurun Kee et al., (2009); Cadot & Malouche (2012) sekaligus menegaskan bahwa manfaat FTA sangat dipengaruhi kesiapan domestik untuk memenuhi persyaratan pasar (Urata & Okabe, 2020).

Dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia telah mendorong modernisasi prosedur perdagangan melalui digitalisasi layanan dan penyederhanaan proses ekspor. Namun, Ilham menilai bahwa reformasi tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan *noodle bowl effect* dan kompleksitas NTMs, khususnya pada lapisan kepatuhan ROO, perbedaan dokumen lintas FTA, serta biaya pemenuhan standar yang terus meningkat (Wawancara, 9 September 2025). Dalam konteks ini, strategi konsolidasi, multilateralisasi, harmonisasi, dan dilusi yang diusulkan Menon (2014; 2016) relevan sebagai kerangka respons.

Konsolidasi melalui *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), misalnya, dapat dipahami sebagai upaya menyederhanakan kerangka aturan kawasan dan mengurangi beban tumpang tindih ketentuan antarperjanjian. Pada saat yang sama, dorongan harmonisasi standar teknis dan pengembangan *mutual recognition arrangements* di sektor tertentu berpotensi menurunkan biaya kepatuhan, meskipun implementasinya bertahap. Sementara itu, dilusi tercermin dalam agenda penyederhanaan persyaratan administratif serta fasilitasi perdagangan untuk menekan biaya transaksi (Menon, 2016).

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kompleksitas implementasi FTAs di Indonesia mengonfirmasi kekhawatiran literatur tentang *noodle bowl effect*: akses preferensi yang tersedia secara formal masih kerap tertahan oleh biaya kepatuhan ROO dan persyaratan standar yang semakin ketat. Kompleksitas tersebut berdampak nyata pada keputusan pelaku usaha terutama UMKM untuk tidak menggunakan preferensi ketika biaya kepatuhan dan ketidakpastian prosedur lebih besar daripada manfaat penghematan tarif. Bagian berikutnya membahas strategi untuk memaksimalkan dampak FTAs terhadap transformasi ekonomi dengan menurunkan hambatan *de facto*, memperkuat kapasitas kepatuhan pelaku usaha, dan memperluas dukungan teknis-digital agar pemanfaatan preferensi meningkat secara lebih inklusif.

### **3. Strategi Indonesia Memaksimalkan Dampak FTAs Terhadap Transformasi Ekonomi**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memandang *free trade agreements* (FTAs) tidak hanya sebagai instrumen penurunan hambatan perdagangan, tetapi juga sebagai perangkat strategis untuk mendukung agenda transformasi ekonomi termasuk hilirisasi, ekonomi berkelanjutan, dan penguatan integrasi dalam *global value chains*. Ilham dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menegaskan bahwa arah perundingan dan implementasi FTA semakin diarahkan untuk membuka akses pasar bagi produk bernilai tambah serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional maupun global (Wawancara, 9 September 2025).

Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa nilai jangka panjang FTA tidak semata diukur dari peningkatan volume perdagangan, melainkan dari kemampuannya mendorong diversifikasi ekspor, peningkatan produktivitas, dan *upgrading* struktural industri (Cheong, 2010; Urata & Okabe, 2020; Petri et al., 2023). Namun, literatur juga mengingatkan bahwa preferensi tarif dapat menimbulkan konsekuensi yang perlu diantisipasi, termasuk *trade diversion* ketika perdagangan bergeser dari mitra yang lebih efisien ke mitra yang kurang efisien (Baier & Bergstrand, 2007; Cheong, 2010). Selain itu, terdapat risiko jangka panjang berupa ketergantungan pada pasar tertentu bila diversifikasi tidak berjalan, potensi *lock-in* pada struktur ekspor

berbasis sumber daya tanpa *upgrading* teknologi yang memadai, serta semakin ketatnya standar keberlanjutan dan ketenagakerjaan yang dapat menjadi hambatan *de facto* meskipun tarif preferensial tersedia (Urata & Okabe, 2020; Petri et al., 2023).

Sejalan dengan itu, Irawan dari Direktorat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menekankan bahwa tuntutan keberlanjutan dan kepatuhan ketenagakerjaan di negara mitra dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan memperpanjang proses pemenuhan persyaratan akses pasar (Wawancara, 9 September 2025). Karena itu, evaluasi dampak FTAs perlu dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya pada indikator agregat, tetapi juga pada level sektoral dan kesejahteraan. Indikator seperti nilai preferensi yang benar-benar digunakan (*value of preferences*), perubahan struktur ekspor, dan produktivitas/*upgrading* industri perlu diterapkan secara lebih sistematis untuk membedakan kontribusi *trade creation* dan *trade diversion* (Cheong, 2010).

Di tingkat kebijakan, langkah konsolidasi, penyederhanaan prosedur dan digitalisasi layanan perdagangan, serta harmonisasi regulasi dapat dipahami sebagai upaya menurunkan friksi implementasi; namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi pelaksanaan, kapasitas institusional, dan dukungan teknis bagi pelaku usaha, terutama UMKM (Menon, 2014; Menon, 2016). Secara keseluruhan, FTAs dapat menjadi bagian penting dari strategi transformasi ekonomi, tetapi manfaatnya tidak otomatis: hasil jangka panjang sangat ditentukan oleh kemampuan memperkuat kapasitas domestik, memenuhi standar, dan memitigasi risiko ketergantungan pasar serta *trade diversion*.

## Kesimpulan

Efektivitas perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreements/FTAs*) Indonesia dalam mengurangi hambatan perdagangan masih bersifat parsial: meskipun FTAs secara legal-formal menurunkan tarif dan memperluas akses pasar, realisasi pengurangan hambatan di tingkat pelaku usaha belum optimal karena *utilization rate* preferensi tarif tetap rendah, terutama akibat kompleksitas *rules of origin* (ROO), perbedaan standar teknis dan sertifikasi antar mitra, serta menguatnya hambatan nontarif berbasis keberlanjutan dan ketenagakerjaan; kondisi ini diperparah oleh kesenjangan kapasitas kepatuhan antara perusahaan besar dan UMKM serta kesiapan fasilitasi perdagangan (logistik dan digitalisasi) yang belum merata, sehingga penurunan tarif “di atas kertas” tidak otomatis menurunkan biaya dan friksi perdagangan “di lapangan”, dan karenanya optimalisasi FTAs mensyaratkan penguatan tata kelola implementasi melalui harmonisasi regulasi dan standar, penyederhanaan prosedur dan dukungan teknis digital bagi pelaku usaha, serta konsolidasi kerangka perjanjian untuk menekan kompleksitas, agar FTAs benar-benar berkontribusi pada pengurangan hambatan perdagangan dan agenda transformasi ekonomi nasional.

## Daftar Pustaka

Anderson, J. E., & Wincoop, E. V. (2003). Gravity With Gravitas: A Solution To The Border Puzzle. *American Economic Review*, 93(1), 170-192.

Andiani, D. (2024). Impact Analysis Of Rules Of Origin On Indonesia Export Performance: Case Study On Indonesia Japan. *Cendekia Niaga*, 8(2), 134-145.

Baier, S. L., & Bergstrand, J. H. (2007). Do Free Trade Agreements Actually Increase Members’ International Trade?. *Journal of International Economics*, 71(1), 72-95.

Baldwin, R. E. (2008). Managing The Noodle Bowl: The Fragility Of East Asian Regionalism. *The Singapore Economic Review*, 53(3), 449-478.

Cadot, O., & Malouche, M. (2012). *Non-Tariff Measures: A Fresh Look At Trade Policy’s New Frontier*. Washington, DC: World Bank.

Elms, D. K. (2013). The Trans-Pacific Partnership: The Challenges Of Unraveling The Noodle Bowl. *International Negotiation*, 18(1), 25-50.

Gani, A. (2017). The Logistics Performance Effect In International Trade. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, 33(4), 279-285.

Hayakawa, K., Laksanapanyakul, N., & Yoshimi, T. (2021). Utilization Of Free Trade Agreements In ASEAN. *Asian Economic Journal*, 35(3), 213-237.

Kawai, M., & Wignaraja, G. (2011). Asian FTAs: Trends, Prospects, And Challenges. *Journal of Asian Economics*, 22(1), 1-22.

Kee, H. L., Nicita, A., & Olarreaga, M. (2009). Estimating Trade Restrictiveness Indices. *The Economic Journal*, 119(534), 172-199.

Martí, L., Puertas, R., & García, L. (2014). The Importance Of The Logistics Performance Index In International Trade. *Applied Economics*, 46(24), 2982-2992.

Menon, J. (2014). Trade Agreements: New Approaches To The Noodle Bowl. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 1(3), 470-483.

Menon, J. (2016). Trade Multilateralization And The Need For Policy Harmonization In Asia. *Asian Development Review*, 33(2), 42-58.

Nasution, N. A., & Verico, K. (2019). Utilization Of Free Trade Agreement In Indonesia: Firm-Level Data Analysis Of The Yogyakarta Special Region. *Economics and Finance in Indonesia*, 65(2), 169-186.

Ningsih, C. (2018). Pemanfaatan Kerja Sama Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA). *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 12(2), 189-214.

Patunru, A. A. (2023). Trade Policy In Indonesia: Between Ambivalence, Pragmatism And Nationalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(3), 285-307.

Petri, P. A., & Plummer, M. G. (2021). The Regional Comprehensive Economic Partnership: A New Era Of Economic Integration In Asia. *Journal of Asian Economics (JRIME)*, 3(3), 85-93.

Portugal-Perez, A., & Wilson, J. S. (2012). Export Performance And Trade Facilitation Reform: Hard And Soft Infrastructure. *World Development*, 40(7), 1295-1307.

Revindo, M. D. (2017). Export Barriers And Exporter Behavior: Evidence From Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 63(2), 97-123.

Tambunan, T. T. H. (2024). Micro And Small Enterprises' Export Competencies And Export Engagement In Indonesia. *Journal of Developing Economies*, 26(2), 73-96.

Tinbergen, J. (1962). *Shaping The World Economy: Suggestions For An International Economic Policy*. New York, NY: The Twentieth Century Fund.

Urata, S., & Okabe, M. (2020). The Impact Of Free Trade Agreements On Trade Flows: Evidence from Asia. *Journal of Asian Economics*, 68, 101234.

Yuliati, L. N., Komariyah, S., & Ayu, D. (2023). Analysis Of Implementation Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Toward Export Value Growth In Indonesia. *Jurnal Economia*, 19(1), 25-37.